

ABSTRAK

Rofik, Abdur. 05110162. 2010. Resepsi Al-Mashlahat Al-Mursalah dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Sudirman, M.A

Kata kunci: Penerimaan, Mashlahah, Al-Mashlahat Al-Mursalah, Peraturan Daerah.

Formalisasi hukum Islam pada periode yang berkembang di Indonesia didahului dengan terbitnya Staatblad 1882 No. 152 di era Gubernur Van Den Berg atau cukup populer dengan teori *receptio in complexu*. Kenyataan seperti itu telah membawa bangsa ini kepada suatu kesadaran bahwa agama dan negara adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hal reformasi hukum. Munculnya UU No. 1 Tahun 1974 yang diikuti dengan KHI, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dan baru-baru ini diterbitkan KHES Tahun 2009 adalah konsekuensi dari kebutuhan hukum bangsa ini sejak hari kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, menurut konsep sistem hukum sipil eropa kontinental, hukum akan berlaku dan berdiri sendiri jika telah dikodifikasikan melalui lembaga legislatif.

Dalam studi hukum Islam, al-mashlahat al-mursalah adalah salah satu dari asas pembentukan hukum baru, yang tidak dapat ditemukan penjelasannya baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Atau dapat juga dikatakan bahwa pembentukan hukum di sini memiliki visi dan misi yang selaras dengan Al-Quran dan Hadis. Berasumsi padahal itu, pembentukan hukum baru yang mengacu pada konsep hukum sipil yang melewati proses legislasi di Indonesia adalah pada titik tertentu memiliki tujuan yang sama atau maqashid, yaitu pemberlakuan hukum pada khususnya, yang memang akan membawa mashlahah dan menutup mudhorot. Oleh karena itu, tesis ini menggunakan produk hukum lokal yaitu Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai sumber hukum primer untuk dirumuskan permasalahannya, tentang bagaimana konsep kemakmuran dalam al-mashlahat al-mursalah diterima ke dalam fase perancangan perundang undangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia? Dan Bagaimana nilai-nilai kesejahteraan hukum Islam diterjemahkan ke dalam bahasa undang-undang yang valid tentang Peraturan Daerah Kesejahteraan Hari Tua?

Pemahaman terpadu terhadap produk hukum seperti Peraturan Daerah dibutuhkan suatu pendekatan yang relevansi antara peraturan dan peraturan lainnya dapat dibaca secara menyeluruh dan utuh. Dengan memanfaatkan pendekatan undang-undang pemahaman hukum akan berfokus pada hirarki peraturan di mana secara bertahap aturan yang mengandung akan diatur lebih lanjut mulai dari tingkat pusat turun ke tingkat lokal. Pemahaman hukum ini tidak sempurna bila tidak menyangkut fase perencanaan undang-undang (legal drafting) atau Program Legislasi Daerah menurut istilah UU No. 10 tahun 2004. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan metode penalaran hukum deduktif penelitian ini mencoba untuk mencari pola Resepsi al-mashlahat al-mursalah dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa al-mashlahat al-mursalah, yang didefinisikan sebagai keselarasan visi dan misi dalam pembentukan hukum dengan visi misi Al-Quran, telah menempatkan konsep mashlahah melalui batasan atau partikel yang seharusnya ada. Kemudian, dengan mengikuti arah itu proses mashlahat mursalah secara tidak langsung telah dilalui sekaligus juga mengindikasikan adanya resepsi hukum Islam.